

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan dan potensi penerbitan sukuk oleh pemerintah propinsi. Proses estimasi ini didasarkan pada analisis peta kemampuan dan potensi yang bertujuan menyusun peta kemampuan meminjam dan menerbitkan sukuk untuk masing – masing propinsi di Indonesia.

Obyek atau data dalam penelitian ini adalah kumpulan elemen yang terkait dengan data keuangan (APBD), data kesejahteraan dan data dana tabungan masyarakat dan data komposisi penduduk muslim di masing – masing daerah. Data dimaksud dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2006.

3.2 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis kinerja pendapatan asli daerah, analisis regulasi dan analisis potensi permintaan sukuk. Dalam penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai kasus dari subyek penelitian. Analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis indeks dengan tujuan untuk mengetahui posisi dari suatu objek dibandingkan dengan kondisi populasi secara umum.

Analitis indeks adalah bagian dari metode analitis kuantitatif, dengan menekankan pada pengujian data –data yang ada. Metode yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Pangestu Subagyo (2003:1) menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai statistika deskriptif adalah bagian statistika mengenai pengumpulan data, penyajian, penentuan nilai-nilai statistika, pembuatan diagram atau gambar mengenai sesuatu hal, disini data yang disajikan dalam bentuk yang lebih mudah

dipahami atau dibaca. Iqbal Hasan (2001:7) menjelaskan Statistik deskriptif atau statistic deduktif adalah bagian dari statistik yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistic deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena.

Pengolahan data dengan metode Indeks ini juga digunakan Deputy Pendanaan Bappenas dalam penelitian tentang kinerja PAD yang dilakukan pada tahun 2002 dengan judul Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan daerah.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini terkait erat dengan penentuan keseluruhan populasi. Meski demikian untuk menjamin adanya kesesuaian data dalam membandingkan antara analisis yang satu dengan yang lain perlu dicari tahun yang mendekati kondisi dimana seluruh komponen data terdapat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak pengumpul data dan dipublikasikan kepada pengguna data.

Pengambilan data dilakukan pada sumber-sumber yang relevan seperti Biro Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan. Selain lembaga diatas, penelitian ini juga mengambil data sekunder dan jurnal-jurnal, buku-buku literatur dan juga penelusuran data melalui internet.

Data yang dimaksud adalah variabel dalam penelitian yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB)

3. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
4. Dana Alokasi Umum
5. Dana Bagi Hasil
6. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
7. Angsuran Pokok Pinjaman, Bunga dan Biaya
8. Dana Alokasi Khusus
9. Dana Darurat
10. Dana Pinjaman
11. Data komposisi keluarga sejahtera
12. Data potensi Dana Likuid
13. Data komposisi penduduk muslim

3.5 Validasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian

Sebelum melakukan analisis terhadap data yang terkumpul maka perlu dilakukan proses validasi dan pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui prosedur yang sering dikemukakan para pakar penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu menerapkan prinsip validitas, reabilitas dan obyektifitas.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan dua metode yaitu :

1. Analisis Pinjaman daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54/2005;
2. Analisis yang digunakan selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif dengan metode indek

Secara operasional metode analisis ini sebagai berikut :

1. Analisis Kemampuan Keuangan Propinsi

Metode analisis ini digunakan untuk menyusun peta kemampuan keuangan propinsi dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah, terutama berdasarkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD). Parameter yang digunakan adalah Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui Ukuran Elastisitas, *Share* dan *Growth*; Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks

- a. Elastisitas adalah rasio pertumbuhan PAD dengan pertumbuhan PDRB. Rasio ini bertujuan melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.
- b. *Share* merupakan rasio PAD terhadap belanja pembangunan daerah. Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai belanja daerah
- c. *Growth* adalah angka pertumbuhan PAD tahun n dari tahun $n-1$
- d. Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai *growth* dan *share*. Dengan nilai *growth* dan *share* maka masing – masing propinsi dapat diketahui tingkat kemampuan masing – masing daerah.
- e. Metode Indeks Kemampuan Keuangan merupakan rata – rata hitung dari Indeks pertumbuhan (*Growth*), Indeks Elastisitas dan Indeks *Share*. Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen. Menyusun indeks untuk setiap komponen IKK dilakukan dengan menggunakan persamaan umum
- f. Nilai IKK 33 propinsi diurut dimulai dari yang terbesar. Seperti besar pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai provinsi-provinsi yang mempunyai kemampuan keuangan tinggi. Seperti besar kedua dikelompokkan dan dikategorikan sebagai provinsi – provinsi yang mempunyai kemampuan keuangan sedang. Dan sepertiga besar terakhir dikelompokkan dan dikategorikan sebagai provinsi – provinsi yang mempunyai kemampuan keuangan rendah.

2. Selanjutnya untuk mengukur kemampuan daerah dalam berhutang, penelitian ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 54/2005, yaitu Analisis Kemampuan daerah dalam mengelola pinjaman jangka panjang
 - a. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* lebih besar atau sama dengan 2,5
 - b. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar sebesar 0,75 dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

3. Analisis permintaan sukuk dengan menggunakan metode indeks memperhitungkan peta permintaan dengan menggunakan tiga parameter yaitu :
 - a. Jumlah dana likuid. Digunakannya parameter ini tidak terlepas bahwa dalam memperhitungkan potensi permintaan tidak bisa dilepaskan dengan jumlah dana likuid yang siap untuk diinvestasikan;
 - b. Jumlah komposisi keluarga sejahtera, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan di masing – masing daerah sehingga akan mempengaruhi tingkat permintaan masing – masing daerah akan penawaran sukuk daerah;
 - c. Jumlah penduduk muslim. Digunakannya parameter ini untuk mempertimbangkan tingkat permintaan umat islam atas penawaran instrumen investasi yang berbasis syariah.

Secara teknis kerangka penyelesaian penelitian sebagai berikut :

A. Indeks Kemampuan Penerbitan Sukuk

- I. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui Ukuran Elastisitas, *Share* dan *Growth*
 - a. 1. Perhitungan Kinerja PAD melalui Elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi daerah

$$\frac{PAD\ n - PAD\ n-1}{PDRB\ n - PDRB\ n-1}$$

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

$$3. \quad \text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

- b. 1. Perhitungan Kinerja PAD melalui *Share* PAD terhadap belanja aparatur dan belanja pelayanan publik.

$$\frac{\text{P A D}}{\text{Belanja Aparatur + Belanja Pelayanan Publik (APBD)}}$$

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

$$3. \quad \text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

- c. 1. Perhitungan *Growth*

$$\frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1}}{\text{PAD}_n} \times 100\%$$

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

$$3. \quad \text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

- f. Berdasarkan persamaan di atas maka persamaan IKK

$$\text{IKK} = \frac{\text{XG} + \text{XE} + \text{XS}}{3}$$

Dimana,

XG = Indek Pertumbuhan (PAD)

XE = Indek Elastisitas (Belanja Pembangunan terhadap PAD)

XS = Indeks *Share* (PAD terhadap APBD)

II. Perhitungan Indek Kemampuan Hutang (IKH) merujuk PP No. 54 Tahun 2005, yaitu ketentuan – ketentuan untuk melakukan pinjaman jangka panjang sebagai berikut :

a. *Debt Service Coverage Ratio* merujuk PP 54 Tahun 2005

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{(P + B + BL)} \geq 2,5$$

Dimana,

DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan Sumber Daya Alam

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh pemerintah daerah seperti belanja pegawai

P : Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran bersangkutan

B : Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

BL : Biaya lainnya, meliputi biaya komitmen, biaya bank, dan lain – lain yang jatuh tempo

- b. 1. Jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar sebesar 0,75 dari penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Merujuk PP 54 Tahun 2005

$$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL)$$

Dimana,

PU : Penerimaan umum APBD

PD : Jumlah penerimaan daerah

DAK : Dana Alokasi Khusus

DD : Dana Darurat

DP : Dana Pinjaman

PL : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu

Dalam hal ini, penerimaan umum (PU) daerah adalah jumlah penerimaan /uang yang ada pada kas daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman dan penerimaan lain – lain. Nilai dari perhitungan PU akan digunakan untuk mengetahui batas maksimum suatu daerah dapat melakukan pinjaman setelah dikalikan besar 75% (penerimaan umum APBD tahun sebelumnya)

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

3. Indeks Pinjaman Daerah (IPD)

$$\text{Indeks XPD} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

Dimana

XPD : Indek Pinjaman Daerah

III. Indeks Kemampuan Penerbitan Sukuk Daerah

$$IKP = \frac{IKK + IPD}{2}$$

B. Indeks Potensi Permintaan Sukuk

I. Potensi Penduduk Muslim

$$1. X_I = \frac{\text{Jumlah penduduk muslim}}{\text{Jumlah penduduk muslim nasional}}$$

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

3. Indeks Potensi Penduduk Muslim (Indeks I)

$$\text{Indeks XI} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

II. Prosentase Keluarga Sejahtera

$$1. X_{KS} = \frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera propinsi}}{\text{Jumlah keluarga sejahtera nasional}}$$

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

3. Indeks Potensi Keluarga Sejahtera (Indeks KS)

$$\text{Indeks XKS} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

III Prosentase Komposisi Potensi Dana Likuid

1.

$$XUL = \frac{\text{Jumlah potensi dana likuid propinsi}}{\text{Jumlah potensi dana likuid nasional}}$$

2. Menentukan nilai x maksimum dan nilai x minimum

3. Indeks Komposisi Potensi Dana Likuid (Indeks UL)

$$\text{Indeks XUL} = \frac{\text{Nilai X hasil pengamatan} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}}$$

IV. Berdasarkan persamaan di atas maka persamaan Indeks Potensi Permintaan

$$IPP = \frac{XI + XKS + XUL}{3}$$

Dimana,

XI = Indeks Komposisi Penduduk Muslim

XKS = Indeks Komposisi Keluarga Sejahtera

XUL = Indeks Komposisi Uang Likuid

C. Indeks kemampuan dan potensi penerbitan sukuk propinsi

I. Metode Kuadran

Hasil perhitungan dan kombinasi antara nilai IKP (Indeks Kemampuan Penerbitan) dan IPP (Indeks Potensi Permintaan) dimasukkan ke dalam grafik dan dipetakan dalam empat kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. Kondisi daerah yang paling layak untuk menerbitkan sukuk. Kondisi ini ditunjukkan oleh kemampuan berhutang yang dimiliki oleh daerah adalah tinggi dan potensi permintaan sukuk juga tinggi

KUADRAN	KONDISI
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan untuk berhutang. Kondisi ini ditandai dengan kemampuan berhutang tinggi tapi potensi permintaan dari masyarakat setempat masih rendah.
III	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah kurang punya kemampuan untuk berhutang tapi potensi permintaan akan penerbitan sukuk tinggi.
IV	Kondisi ini paling buruk. Daerah dimaksud tidak mempunyai kemampuan untuk berhutang juga potensi permintaan sukuk oleh masyarakat setempat rendah.

II. Metode Indeks

$$IKPP = \frac{IKP + IPP}{2}$$

Nilai IKPP propinsi diurut dimulai dari yang tertinggi. Sepertiga besar pertama dikelompokkan dan dikategorikan sebagai propinsi-propinsi yang mempunyai kemampuan dan potensi penerbitan sukuk tinggi. Sepertiga besar kedua dikelompokkan dan dikategorikan sebagai propinsi – propinsi yang mempunyai kemampuan dan potensi penerbitan sukuk sedang. Dan sepertiga besar terakhir dikelompokkan dan dikategorikan sebagai propinsi – propinsi yang mempunyai kemampuan dan potensi penerbitan sukuk rendah.